

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Di era demokrasi sekarang pemerintah diharapkan untuk lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebutuhan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih semakin meningkat, yang mengharapkan keberadaan aparatur pemerintah yang memiliki kompetensi. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel merupakan peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*).

Peraturan pemerintah yang Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 6 menyatakan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Pemerintah Intern (APIP) yang dimana berwanang dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Di tingkat provinsi, tugas ini dijalankan oleh Inspektorat provinsi. Inspektorat memiliki tugas utama untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan.

Salah satu bagian terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah urusan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan keuangan daerah perlu mendapat perhatian lebih. Pengawasan menjadi bagian terpenting yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan daerah, karena pengelolaan keuangan meliputi, perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Konsep pengawasan pada dasarnya merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan untuk melihat atau mengamati aktivitas yang dilakukan oleh aparat pemerintahan daerah apakah sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan, selain itu juga dilakukan sebagai tindakan korektif dari hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian pengawasan dalam prespektif pengelolaan keuangan daerah akan terwujud pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Inspektorat provinsi Sumatera Barat sebagai aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) memiliki tanggung jawab dalam memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan, serta pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan digunakan dengan efektif dan efisien. Fungsi pengawasan yang dilakukan yaitu meliputi audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya yang bertujuan untuk memberikan keyakinan atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Meskipun telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari an Pemeriksa Keuangan (BPK) selama periode 20021-2023, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Beberapa temuan audit mencatat bahwa adanya kelebihan bayar serta penyajian serta pengungkapan aset tetap tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara formal telah memenuhi standar akuntansi, kualitas laporan keuangan belum sepenuhnya mencerminkan pengelolaan keuangan yang

sesungguhnya.

Masalah seperti ini terjadi karna berbagai alasan, seperti belum optimalnya pelaksanaan prosedur pengawasan internal, dan keterbatasan sumber daya manusia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis Tugas Akhir dengan judul, **“Prosedur pengawasan Internal Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Inspektorat provinsi Sumatera Barat”**

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.
2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis hambatan dalam

pelaksanaan pengawasan internal pengelolaan keuangan daerah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

#### **1.4. Manfaat Penulisan**

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penulis tentang pelajaran yang didapatkan selama bangku kuliah.
2. Bagi praktik pada pemerintah daerah, penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai prosedur pengawasan internal kinerja keuangan daerah pada Inspektorat Daerah provinsi Sumatera Barat.
3. Bagi akademisi, penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat menambah referensi dan mendorong penelitian – penelitian berikutnya.
4. Bagi instansi, dapat memberikan masukan dan saran kepada instansi sesuai dengan pengetahuan mahasiswa.

#### **1.5. Metode Penulisan**

Dalam melakukan penulisan Tugas Akhir ini penulis mendapatkan dua metode sebagai :

##### **1.5.1. Observasi**

Metode observasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dengan mengamati bagaimana proses yang terjadi, dan bertujuan untuk memahami berbagai jenis informasi yang berkaitan dengan penulisan Tugas Akhir yang dilakukan.

##### **1.5.2. Wawancara**

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui sesi tanya jawab

baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### **1.6. Tempat dan Waktu Magang**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penulis memilih Inspektorat Provinsi Sumatera Barat sebagai tempat melaksanakan kegiatan magang. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 bulan atau 40 hari kerja.

#### **1.7. Sistematika Penulisan**

Laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab dimulai dari BAB 1 Pendahuluan hingga BAB V Kesimpulan. Berikut rincian sistematika penulisan laporan tugas akhir ini :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab awal dari penulisan laporan ini, dimana berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan kegiatan magang, manfaat penulisan, metode penelitian, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan

##### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori-teori pendukung yang berkaitan dengan laporan penelitian yang dibuat.

##### **BAB III GAMBARAN UMUM**

Bab ini menjelaskan bagaimana prosedur yang dilakukan dalam sebuah penelitian, dimulai dari penentuan topik penelitian, hingga terciptalah sebuah laporan penelitian.

##### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.



## **BAB V PENUTUP**

Bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan Tugas akhir, bab ini berisi kesimpulan dan saran



